



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSKESMAS MAMPU  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)  
DI KOTA PEKALONGAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Disusun Oleh:

**EDY DWI PURWANTO**

211003631010510

Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Kesehatan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

**2023**



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSKESMAS MAMPU  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)  
DI KOTA PEKALONGAN**

**TESIS**

Oleh :

**EDY DWI PURWANTO**

211003631010510

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr. Hj. Tri Lestari Hadiati, M.Si**  
NIDN. 0618056501

Pembimbing II

**Dr. Karmanis, M.Si**  
NIDN. 0605066601

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

**Dr. Hj. Tri Lestari Hadiati, M.Si**  
NIDN. 0618056501



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSKESMAS MAMPU  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)  
DI KOTA PEKALONGAN**

**TESIS**

Oleh :

**EDY DWI PURWANTO**

211003631010510

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister  
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan  
disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, Agustus 2023

1. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si  
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Karmanis, M.Si  
Penguji 2
3. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si  
Penguji 3

*Tri*  
.....  
*Ami*  
.....  
*Suparno*  
.....

Mengesahkan,  
Dekan FISIP UNTAG Semarang

*Rini Werdiningsih*  
**Dr. Rini Werdiningsih, M.S.**

NIDN, 0621105901

## ABSTRAK

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak. Berbagai upaya dan kebijakan Pemerintah telah dilakukan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana salah satu sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 yaitu menurunnya AKI dan AKB. Kondisi AKI di Kota Pekalongan per 100.000 KH pada tahun 2021 sebesar 54,2% dari target 102 terealisasi sebesar 188,23. Kondisi tersebut dapat dikatakan tidak terdapat efektifitas implementasi dalam pencapaian indikator AKI. Sedangkan masalah yang masih menjadi kendala dalam upaya penurunan AKI di Kota Pekalongan diantaranya Puskesmas mampu PONEDED masih terdapat 1 tim sedangkan idealnya terdiri dari 3 tim sehingga kegiatan PONEDED belum sepenuhnya optimal, belum berfungsinya Puskesmas PONEDED yang sesuai standar Puskesmas PONEDED. Metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan model Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang keseluruhan memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan kinerja implementasi Puskesmas mampu PONEDED di Kota Pekalongan secara efektif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan *interview guidance*, *check list* hingga handphone untuk dokumentasi dan merekam suara. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel sumberdaya Puskesmas mampu PONEDED di Kota Pekalongan belum semua tim inti PONEDED yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan memiliki sertifikat pelatihan PONEDED, tidak adanya tim pendukung PONEDED. Kondisi Alat Kesehatan kurang memadai, sarana fisik konstruksi ruangan terdapat Puskesmas mampu PONEDED kondisinya kurang layak dan membutuhkan rehabilitasi bangunan serta perluasan ruangan layanan persalinan. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan PONEDED yaitu aspek kualitas SDM yaitu tidak adanya tim pendukung PONEDED yang ditetapkan dalam keputusan dengan uraian tanggungjawab, hak, wewenang dan uraian tugas secara jelas, kemudian aspek kelengkapan alat kesehatan, faktor penghambat lainnya yang paling utama adalah kompetensi atau kualifikasi SDM Kesehatan sebagai tim inti PONEDED belum semua memiliki sertifikasi pelatihan PONEDED yang sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan PONEDED secara efektif. Faktor-faktor pendukung keberhasilan Implementasi Puskesmas mampu PONEDED adalah adanya sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan berupa penguatan sub bidang penurunan AKI dan AKB yang berupa renovasi/penambahan ruang pelayanan, alat kesehatan Puskesmas mampu PONEDED, dan telekonsultasi medis, adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan RS PONEK berperan memberikan pembinaan dan monitoring evaluasi dalam pembekalan kualitas SDM Kesehatan berupa magang (*on the job training*) bagi petugas PONEDED di Puskesmas maupun pembinaan teknis lainnya. Sehingga dari kendala/hambatan tersebut diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM Kesehatan melalui pelatihan teknis internal dan *on the job training* secara rutin di RS PONEK dan penunjukan personil sebagai tim pendukung PONEDED yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Puskesmas, update secara berkala Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan, *self assesment* terhadap indikator implementasi Puskesmas mampu PONEDED dan menindaklanjutinya. Kemudian dalam hal mutasi pegawai sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Pekalongan agar dapat berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas, pengelola bidang Kesehatan Ibu dan Anak guna mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kualifikasi dan kompetensi SDM Kesehatan yang bersertifikat PONEDED.

**Keywords :** *PONEDED, Implementasi kebijakan, SDM*